



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **GONG MATUA HASIBUAN**
2. Jabatan : **KEPALA SATUAN MANAJEMEN RISIKO**
3. NHK : **172207**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.569.170.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 858.750.000
2. Bangunan Seluas 34 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 60000 m2 di KAB / KOTA PADANG LAWAS, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. Bangunan Seluas 28 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 465.420.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000
6. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
7. Tanah Seluas 18000 m2 di KAB / KOTA PADANG LAWAS, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
8. Tanah Seluas 156 m2 di KAB / KOTA PADANG LAWAS, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 571.000.000

1. MOBIL, HONDA SUV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 555.759.400



D. SURAT BERHARGA	Rp.	3.120.813.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	829.003.554
F. HARTA LAINNYA	Rp.	509.991.038
Sub Total	Rp.	10.155.736.992
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	10.155.736.992

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.